

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LHP KINERJA KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN *PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT*

**Banda Aceh, Jumat (13 Desember 2019)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kinerja Kesehatan, Pendidikan, dan *Public Financial Management* kepada Lembaga Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota/Kabupaten Aceh Barat, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Timur, dan Lhokseumawe.


LHP atas Pemeriksaan Kinerja Kesehatan, Pendidikan, dan *Public Financial Management* ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA.** Acara ini dihadiri oleh **Samsi Barmi** selaku Ketua DPRK Aceh Barat, **Ahmad Yani** selaku Ketua Komisi IV DPRK Aceh Barat, **Drs. Adonis, M.Si.** selaku Sekretaris Daerah Aceh Barat, **Suprianto, S.T.** selaku Ketua DPRK Aceh Tamiang, **Basyaruddin, S.H.** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, **Jonniadi, S.E.** selaku Ketua DPRK Nagan Raya, **H.M. Jamin Idam, S.E.** selaku Bupati Kabupaten Nagan Raya, **Muhammad Nur, S.Pdl., M.H.** selaku Wakil Ketua DPRK Aceh Timur, **H.M. Ikhsan Ahyat, S.STP., M.AP.** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, **Irwan Yusuf** selaku Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, dan **Yusuf Muhammad, S.E., M.S.M.** selaku Wakil Walikota Lhokseumawe.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota ini meliputi Pemeriksaan Kinerja Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tamiang, Pemeriksaan Kinerja Bidang Pendidikan dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017 s.d 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dan Pemeriksaan Kinerja *Public Financial Management* dalam meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Dalam pidatonya, **Bapak Arif Agus** menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam bidang kesehatan, pokok permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yaitu (1) Pemanfaatan dana kapitasi pada beberapa puskesmas pada belum tepat sasaran dan (2) Rencana pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (DBH-PR) dan Otonomi Khusus (Otsus) belum disertai perhitungan skala prioritas dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, pokok permasalahannya yaitu (1) Pemanfaatan dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang belum mencapai target, (2) Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (CHT), pajak rokok, dana alokasi umum (DAU), Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak (BHP/BHBP), Dana Intensif Daerah (DID) bidang kesehatan belum tepat sasaran dan (3) Alokasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik pada kedua kabupaten tersebut belum didasarkan pada skala prioritas kebutuhan dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

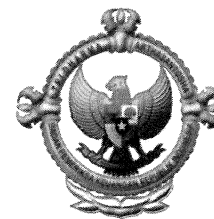
---

### Informasi lebih lanjut:

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan   
Telp. 0651-32627  
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH




Pada bidang pendidikan, pokok permasalahan di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yaitu (1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum sepenuhnya menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid, (2) Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran, dan (3) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Satuan Pendidikan belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Pada bidang *public financial management*, pokok permasalahan di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yaitu (1) Analisis ekonomi belum dilakukan secara memadai dalam mengusulkan program dan kegiatan, dan (2) Proyeksi biaya atas program dan kegiatan belum sepenuhnya memadai. Sedangkan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe pokok permasalahannya yaitu (1) Kegiatan Dana Alokasi Daerah (DAK) belum dilaksanakan seluruhnya dan belum dipertanggungjawabkan secara optimal, (2) Penyampaian informasi transfer dana kepada pemerintah dibawahnya belum tepat waktu, dan (3) Penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan belum selaras antara dokumen perencanaan serta pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan belum optimal.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kota dan Kabupaten yang bersangkutan atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

**Subbagian Humas dan TU Kalan**

---

**Informasi lebih lanjut:**

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan   
Telp. 0651-32627  
Faks. 0651-21166, Email : [perwakilan.aceh@bpk.go.id](mailto:perwakilan.aceh@bpk.go.id)